

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Maryono, 2021, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Morfologi, Ekologi, Hidrologi dan Keteknikan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ariesto Hadi Sutopo, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono, 2002 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*, Cetakan XIII, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Maria.S.W.Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2020, *Penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria Dari Masa ke Masa*, Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2014, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, Universita Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2008.
- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nurhasan Ismail, 2018, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang.
- Efendi Perangin Angin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Perkasa, Depok.

Robert J Kondoatie dan Sugiyanto, 2002, *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Robert Kurniawan Ruslak Hammar, 2017, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal*, Calpulis, Yogyakarta.

Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok.

Slamet Suprayogi, Setyawan Purnama dan Darmakusuma Darmanto, 2015, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

_____, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

B. ARTIKEL, KARYA ILMIAH (SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI), MAKALAH, JURNAL

Edi Purwanto dan Juni Gultom, 2013, “*Kajian Tipo-Morfologi Permukiman Tepi Sungai (Studi Kasus Permukiman Tepian Sungai Arut Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)*”, Jurnal Tesa Arsitektur, Vol.11 No. 2, Semarang.

M. Heru Sutrisno dan La Sina, 2013, “*Status Tanah Warga Pinggir Sungai Mahakam (Studi di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda)*”, Jurnal Beraja Niti, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.

Nita Prawita, 2015, “*Hak Penguasaan atas Tanah di Sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta*”, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Noor Hamidah, Rijanta, Bakti Setiawan dan Muh.Aris Marfai, 2016, “*Analisis Permukiman Tepian Sungai Yang Berkelanjutan Kasus Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya*”, Jurnal Inersia Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.XII No. 1, Yogyakarta.

Noor Rico Septian, 2011, “*Perubahan Status Tanah Negara menjadi Hak Milik Pribadi di Bantaran Sungai Kahayan (Studi di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangkaraya)*”, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Nurhasan Ismail, 2020, "*Materi Perkuliahan Pengurusan dan Pendaftaran Atas Tanah*", Magister Kenotarian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Okky Rahman, 2016, *Persepsi Politik Etnis (Studi Kasus Masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah)*, S1 Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Suparno, 2005, "*Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah di sekitar Bantaran Sungai di Kota Surakarta*", Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Risha Oktavyana Djibrin dan Indri Fogar Susilowati, 2020, *Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri*, Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 4, Universitas Negeri Surabaya.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2037.

Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun Tahun 2022 - 2042.

Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-100.PG.01.01/II/2022 tentang Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung.

D. INTERNET

Laman Website <https://www.portal.kotawaringinbarat.go.id/id/gambaran-umum>.

Laman Website <https://www.saplaw.top/kedudukan-surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia/>